

KAJIAN OPINI PEREMPUAN PASCA RELOKASI (Studi Pada Perempuan Kalijodo di Rusun Pulogebang)

Oleh:

Lasmery RM Girsang

Penulis:Lasmery RM Girsang, M.Comm (lasmerymgirsang@gmail.com) adalah Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Bunda Mulia Jakarta.

Abstract

This research titles on “Kajian Opini Perempuan Pasca Relokasi (Studi Pada Perempuan Kalijodo di Rusun Pulogebang)” in general focuses on public opinion. In political communication, public opinion is one of the main concepts. Through this research, the issue of public opinion will be discussed is related to relocation program in Basuki Tjahaja Purnama’s era. Specifically, the researcher gives limitation on women opinion. Till now, there’s still judgment that woman is categorized into isolated society from the bigger system. Therefore, this study case-qualitative research uses ‘Muted Group Theory’ (Cheris Kramarae). There are still so many hidden opinions from society, especially from the minority or pressed group by the situation faced that emerging the mutedness. Whereas, language is still dominated by masculine meanwhile woman cannot express at all sides. Finally, the research relies on participant observation and in-depth-interview to the informants (women who ever lived at Kalijodo, West Jakarta).

Abstrak

Kajian Opini Perempuan Pasca Relokasi (Studi Pada Perempuan Kalijodo di Rusun Pulogebang) diangkat menjadi topik yang mendasari penulis melakukan penelitian ini. Secara umum, opini publik merupakan konsep yang melekat dalam kajian komunikasi politik. Opini publik yang akan digali dalam konteks penelitian ini menyangkut program penertiban (relokasi)—yang menjadi isu ‘panas’ di era kepemimpinan Basuki Thajaja Purnama (Ahok). Secara khusus, peneliti hanya akan membatasi pada opini kaum perempuan. Sampai saat ini, masih ada penilaian bahwa perempuan dianggap masuk ke dalam kelompok masyarakat yang ‘terpinggirkan’ dari sistem sosial yang lebih besar. Untuk itu, penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus ini menggunakan ‘Teori Kelompok Bungkam’ (Cheris Kramarae). Melalui teori tersebut, masih banyak opini tersembunyi atau yang tidak tersampaikan dari sisi masyarakat, khususnya kaum minoritas atau golongan yang merasa tertindas/tertekan oleh situasi dan kondisi yang ada sehingga terbentuk pembungkaman. Adapun ‘bahasa’ yang digunakan masih didominasi maskulinitas dimana para warga perempuan masih belum dapat menyuarakan apirasinya di berbagai bidang. Oleh karenanya, peneliti mengandalkan observasi partisipan dan

wawancara mendalam terhadap narasumber perempuan yang pernah menetap di kawasan eks-Kalijodo (Jakarta Barat).

Kata kunci: Opini Perempuan, Relokasi, Kalijodo, Teori Kelompok Bungkam.

1. Pendahuluan

Dewasa ini, perempuan masih menjadi kelompok yang termarginalkan. Kenyataan tersebut juga tidak jauh berbeda dalam fenomena sosial sehari-hari. Pada kehidupan nyata—dimana kaum hawa telah banyak disibukkan dengan urusan rumah tangga—para perempuan juga turut terkena dampak dari regulasi pemerintahan setempat. Beragam upaya perbaikan dan pembenahan yang berkesinambungan dikerjakan pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta khususnya di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama sedikit banyaknya juga turut memberikan andil atas kurang berdayanya perempuan untuk menyalurkan pendapatnya. Salah satu upaya penertiban kawasan liar yang diproyeksikan sebagai lahan terbuka menjadikan warga—dan juga kaum perempuan di kawasan yang dimaksud—semakin terbatas ruang geraknya, khususnya dalam menyikapi kebijakan pemerintah, termasuk warga perempuan yang dahulu menetap di kawasan Kalijodo (Jakarta Barat) dengan mayoritas berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja di sektor informal.

Pemprov DKI menilai permasalahan di kawasan Kalijodo merupakan persoalan yang melanggar aturan. Tidak sekedar pendirian bangunan liar di jalur hijau, namun terlebih lagi menjadikan bangunan ilegal tersebut sebagai kafe dan lokasi prostitusi. Kenyataan tersebut berusaha dituntaskan oleh Ahok dengan tujuan agar pelanggaran yang telah berpuluh-puluh tahun tersebut tidak terus dibiarkan terjadi. Selain itu, terdapat juga misi yang diemban Pemrov DKI, yakni memberantas PEKAT (PEnyakit masyaraKAT) atau penyakit sosial, khususnya prostitusi. Pemprov DKI dengan segala wewenang tugas yang dijalankan sepenuhnya demi kepentingan publik, tidak ‘memandang bulu’ atas publik mana yang akan menjadi target sasaran, termasuk daerah mana yang juga harus dibenahi.

Pada akhirnya, beragam pemberitaan media terkait upaya relokasi/penertiban/penggusuran di kawasan Kampung Pulo dan Kalijodo telah menarik atensi

publik. Dampak besar dari pemberitaan tersebut telah ‘menyedot’ opini masyarakat.¹ Dengan telah dihuninya kawasan tersebut oleh masyarakat selama berpuluh-puluh tahun, adalah wajar jika timbul pergolakan atau penolakan atas penggusuran yang dilakukan Pemrov DKI. Upaya sosialisasi dan pemberitahuan secara bertahap yang diberikan pemerintah dirasa kurang memadai bagi masyarakat di kawasan tersebut. Hingga sampai pada waktunya, pemerintah bertindak yakni dengan melakukan penggusuran yang menurunkan pasukan keamanan dalam jumlah ribuan personil agar meminimalisir tindakan agresif dari warga yang menolak kebijakan tersebut.

Jika dilihat dari usainya tindakan penertiban tersebut, sebenarnya Pemprov DKI juga tentu menyeimbangkan kebijakan yang ditetapkan dengan upaya solutif. Warga eks-Kalijodo telah dipindahkan (direlokasi) di rusunawa (hunian rumah susun yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai bagi penghuninya). Namun tetap saja, perlu waktu yang lama bagi warga untuk beradaptasi di lingkungan yang baru dengan sistem yang baru sama sekali dengan hunian warga sebelumnya. Kehidupan yang bebas tanpa aturan sangat berbenturan dengan kondisi yang ada di lingkungan rusunawa. Hanya saja ada kemungkinan terjadi pengabaian opini publik dalam prosesnya.

Penelitian ini mengkaji opini publik dari kelompok perempuan saja. Hal tersebut disesuaikan dengan keprihatinan para penggagas *Muted-Group Theory* yang terkait dengan masalah pembungkaman—yang diistilahkan sebagai masalah komunikasi yang frustrasi (*frustrated communication*). Hal tersebut dikarenakan ‘perspektif perempuan’ dihalangi pada tingkat ordiner sehingga pengungkapan mereka secara tidak langsung, bergumam dan terbungkam (Griffin, 2012: 469). Penulis menggunakan *Muted-Group Theory* yang dikelompokkan oleh Griffin kedalam kategori *gender and communication* yang berafiliasi juga dengan kajian-kajian perempuan atau feminisme. Teori yang digagas oleh Cheris Kramarae menekankan beberapa hal dalam teorinya. Antara lain, peran bahasa. Yang terjadi di masa ini adalah bahasa merupakan konstruksi/buatan kaum pria dimana kaum perempuan tidak bebas mengungkapkan keinginan mereka melalui ujaran atau pendapat (karena telah didominasi oleh kaum pria). Seperti definisi berikut:

¹ Kawasan Kalijodo terbentang sepanjang sekitar 1 kilometer di sisi timur Kanal Banjir Barat (KBB). Sebagian besar wilayahnya masuk dalam wilayah Jakarta Utara, yakni RT 001, 003, 004, 005, dan 006 di RW 005 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan. Sementara, sisanya merupakan bagian dari wilayah Jakarta Barat, yaitu RT 007 RW 010 Kelurahan Angke, kecamatan Tambora (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/02/25/o33gso330-penggusuran-kalijodo-mulai-dilakukan-akhir-pekan-ini>).

“Muted group happens whenever people belonging to low-power groups who must change their language when communicating publicly, thus their ideas are often overlooked; e.g., women. Men’s dominant power position in society guarantees that the public mode of expression won’t be directly available to women” (Griffin, 2012: 461).

Ide penting dalam teori tersebut juga dapat diterjemahkan bahwa kelompok yang menyusun bagian teratas dari urutan tingkat sosial menentukan suatu sistem komunikasi bagi budaya tersebut. Kelompok dengan kekuasaan yang lebih rendah seperti wanita, kaum miskin, dan orang kulit berwarna, harus belajar untuk bekerja dalam sistem komunikasi yang telah dikembangkan oleh kelompok dominan, jadi kelompok dominan di dalam teori kelompok bungkam inilah yang mendominasi atau memegang kekuasaan. Beberapa tokoh lainnya seperti Edwin dan Shirley Ardener turut menjelaskan bahwa wanita atau anggota dari kelompok bawah mana pun memang berbicara, tetapi kata-kata mereka berjatuh pada telinga yang tuli, pada akhirnya tentu saja menjadi tidak diucapkan, yang berarti berbicara atau menyampaikan sesuatu pada kelompok dominan tidak akan mendapatkan tanggapan oleh karenanya menjadi percuma atau sia-sia.

Selanjutnya, anggapan Teori Kelompok Bungkam mulai bermunculan yang dibangun oleh Cheris Kramarae adanya asumsi perbedaan persepsi berdasarkan *gender*, diawali dengan pengalaman wanita dan pria berbeda asumsi ini menjelaskan bagaimana pembagian pekerjaan antara wanita dengan pria. Selain itu ada asumsi dominasi pria, di asumsi ini menyatakan bahwa pria adalah kelompok yang dominan dan pengalaman mereka lebih dipilih dibandingkan pengalaman kaum wanita. Secara umum pria memang digambarkan sebagai seorang yang mempunyai wibawa dan dapat menjadi seorang pemimpin, oleh sebab itu kaum wanita kesulitan untuk mempunyai jabatan sebagai pemimpin.

Dalam kehidupan sosial, pria sebagai kelompok yang dominan seringkali mengendalikan banyak keputusan; seperti dalam dunia politik pria yang banyak berbicara daripada wanita, karena pendapat kaum pria yang didengarkan oleh kebanyakan

Di dalam rumah tangga, pria atau seorang ayah dianggap mampu memimpin keluarga. Hal tersebut juga terbentuk sejak awalnya individu terlahir yang telah diperlakukan berbeda oleh orang tua. Hal tersebut adalah proses bagaimana kelompok dominan membungkam kelompok mayoritas dan menguasai sistem. Pembungkaman dapat dilawan dengan menyebutkan strategi

pembungkaman sebagaimana telah dikemukakan. Disebutkan pula bahwa ‘wanita mulai mementingkan dan mempelajari sejarah lisan, buku harian, dan jurnal, dan cara-cara alternatif bagi ekspresi seperti menjahit, menenun, dan pekerjaan tangan lainnya yang sering kali dilakukan oleh wanita. Dengan cara seperti ini wanita sedang mengakui efektivitas, dampak dan kefasihan pengalaman komunikasi wanita dan juga pria. Jadi intinya, pembungkaman dapat dilawan dengan cara mengangkat hal yang dianggap remeh oleh kelompok dominan, dengan begitu hal yang dianggap remeh tersebut menjadi terangkat (Griffin, 2012: 460).

Program Penertiban merupakan program kerja pemprov DKI dan dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat/warga DKI Jakarta. Sasaran program penertiban yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah para pedagang kaki lima, masyarakat yang tinggal di tempat liar milik pemprov dan yang tinggal di kawasan lahan hijau. Beragam program penertiban yang menjadi 5 target penertiban pemprov DKI tahun 2015 yang lalu adalah mencakup penertiban bangunan kios pasar, tertib demonstrasi, tertib lalu lintas, tertib sampah dan tertib hunian (m.liputan6.com/news/read/2159895/ini-5-target-penertiban-pemprov-dki-di-tahun-2015).

Apapun kebijakan tersebut, nantinya berimplikasi kepada perempuan.

Berkaitan dengan penelitian ini, ide “perempuan” menurut Moelyono dkk (2010: 3-4) secara historis lebih dulu keberadaannya dibandingkan kata ‘wanita’. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata ‘perempuan’ bermakna lebih halus; sedangkan ‘wanita’ merujuk pada orang. Secara bahasa, kata ‘perempuan’ ialah ‘yang di-empu-kan’ (empu berarti induk/ahli) sehingga tersirat arti penghormatan (dalam Sadli, 2010: 3). Dalam tulisannya, Sadli (2009:4-5) turut menguraikan perkembangan pesat studi perempuan di negara barat telah berlangsung sejak 1960-an dengan menyuarakan pendapat tentang kondisi dan peran perempuan di dalam masyarakat. Karena jauh sebelumnya, beberapa tokoh filsafat terkenal—seperti John Stuart Mill dan Sigmund Freud—masih menggunakan ukuran patrialis dalam mengukur peran perempuan.

Sehingga, hanya di dalam lingkungan budaya dimana perempuan mempunyai kedudukan dan status sosial yang sama dengan lelaki, barulah perempuan akan lebih dapat menyatakan diri sebagaimana yang ia inginkan. Sebagai penutup, secara singkat disebutkan pula empat determinan yang mempengaruhi perilaku perempuan yaitu: faktor biologi, sosialisasi, kepribadian serta kesempatan partisipasi sosial.

Terkait opini yang ada dalam konsep—secara etimologis—mengacu pada ‘Opini Publik’ (*Public Opinion*) berasal dari dua kata, yaitu opini dan publik. Opini publik juga dapat

ditemukan dalam beberapa terminologi, antara lain: ‘Pendapat Pribadi’, ‘Pendapat Perseorangan’, ‘Pendapat Kelompok’, dan ‘Pendapat Umum’. Pada awalnya, istilah opini publik dipakai dalam konteks politik, terutama jika dikaitkan dengan kebebasan berpendapat atau ruang publik (*public sphere*) bahkan dikaitkan dengan aktivitas/kegiatan propaganda. Itu semua melekat dalam konstruksi komunikasi berbasis gender.

Gender tidak hanya dimaksudkan sebagai pembeda jenis kelamin, melainkan pada perbedaan peran/status sosial yang diemban. Namun, perbedaan tersebut akhirnya ‘melahirkan’ stereotip dan ketidakadilan *gender*. Perempuan sering mengalami pengekangan dan penindasan hingga ‘melahirkan’ beberapa aliran feminisme. Yang menjadi inti aliran feminisme adalah agar perempuan mempunyai kesetaraan (*equality*), termasuk dalam kepemilikan akses.

2. METODE PENELITIAN

Berkaitan dengan metode penelitian, maka riset ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersandar pada paradigma interpretif. Denzin dan Lincoln (2011: 244-245) memberikan definisi:

“Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, report detailed views of information, and conducts the study in a natural setting”.

Sedangkan Sugiyono (2011: 8 &15) menguraikan bahwa:

“Pendekatan kualitatif melihat realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks dan dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.”

Riset ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus kualitatif memiliki ciri bahwa peneliti menghabiskan waktunya di lapangan. Ketika peneliti terjun langsung serta terlibat dengan berbagai aktivitas dan operasi kasus yang diteliti, peneliti juga merefleksikan dan merevisi makna-makna yang bermunculan dari fenomena yang diamati. Studi kasus adalah suatu strategi riset, penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Secara umum, seperti halnya pada tujuan penelitian lain, pada dasarnya peneliti yang menggunakan metode penelitian studi kasus bertujuan untuk memahami objek yang ditelitinya.

Penelitian studi kasus adalah penelitian yang berupa penyelidikan mendalam dari berbagai macam informasi mengenai beberapa unit atau kasus untuk 1 periode atau antar beberapa periode waktu majemuk. Sebuah kasus bisa sederhana atau rumit, tergantung dari fokus peneliti. Dalam prakteknya, lama waktu yang diperlukan untuk fokus pada salah satu kasus, selama peneliti membahas kasus tersebut berarti selama itu pula telah melakukan studi kasus. Di dalam penelitian ini, studi kasus dijadikan sebagai pendekatan keilmuan untuk mengkaji kebijakan publik (opini publik) dan juga sebagai refleksi tentang pengalaman manusia (baca: para perempuan yang terkena program relokasi).

Secara umum, terdapat dua macam kasus: kasus tunggal dan holistik. Sementara bila ditilik dari jenis kajiannya (*study*), Denzin & Lincoln (2009: 301) membagi ke dalam: (a) studi kasus intrinsik (*intrinsic study case*); (b) studi kasus instrumental (*instrumental case study*) serta (c) studi kasus kolektif (*collective case study*). Dalam hal ini, peneliti menerapkan studi kasus intrinsik untuk melihat kedalaman dari kasus yang diangkat yang berlokasi di Rusunawa Pulogebang.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan observasi (yakni *participant observation*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) sebagai langkah-tahapan pengumpulan data. Observasi berpartisipasi sangat diperlukan agar peneliti mendapatkan gambaran dan pemahaman yang riil dari fenomena yang diamati. Sedangkan wawancara mendalam diperlukan juga sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian melalui tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dalam konteks penelitian ini, narasumber berjumlah lima warga perempuan (ibu rumah tangga).

3. PEMBAHASAN.

Riset ini menetapkan Mariamah sebagai narasumber utama (*key informant*). Ibu Mariamah telah menjadi ketua Rukun Tetangga (RT) selama puluhan tahun di Kalijodo dan juga selama menetap di Rusunawa Pulogebang (RPG). Selama menghabiskan 40 tahun lebih hidupnya di Kalijodo, Mariamah mengepalai kurang lebih 100 kepala keluarga. Perempuan (*single parent*) berusia 58 tahun yang memiliki empat orang anak dan beberapa cucu ini,

Mariamah sudah menjadi ikon (simbol) yang kuat di kalangan warga di Kalijodo dengan perannya sebagai ketua RT selama puluhan tahun.

Narasumber dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, sederhana, ramah, bersahaja, solider dan bertoleransi menguatkan posisi dirinya sebagai seorang pemimpin yang dihormati dan disegani warganya. Melalui berbagai kesempatan dan kebersamaan yang dilalui, peneliti berusaha mengenal narasumber lebih dekat. Tanpa segan, narasumber banyak menuturkan kisah kehidupan pribadinya dan pengalaman (suka duka) selama tinggal di Kalijodo. Memiliki rumah sederhana yang berada di pinggir jalan dan tidak berpagar, membuat masyarakat atau orang luar leluasa melintas bahkan singgah di rumah tersebut. Dikarenakan di rumah itu pulalah, Mariamah membuka usaha kecil-kecilan seperti warung, kios telepon seluler dan usaha salon. Bahkan berkat keuletannya, beliau mampu membangun empat rumah mewah sekaligus untuk diwariskan kepada empat anaknya. Akan tetapi sebelum rumah tersebut dihuni, semua bangunan di Kalijodo diluluhlantakkan seketika sebagai konsekuensi dari kebijakan pemprov DKI².

Penganut nasrani ini mengisahkan getirnya kejadian yang menimpanya dan warga Kalijodo terkait relokasi pemprov DKI Jakarta di 2015 lalu. Dari lubuk hati yang terdalam, tentu tidak ada individu yang rela meninggalkan kenyamanan hidup, begitu pula dengan warga di Kalijodo. Oleh karenanya, Mariamah harus mengerahkan kemampuannya untuk meyakinkan warganya untuk bersedia pindah. Meskipun telah mendapatkan sosialisasi dari pihak aparat pemerintah, tetap saja peristiwa penggusuran tersebut dirasa mendadak dan menimbulkan trauma yang mendalam dikarenakan kehilangan seluruh harta benda yang tidak sempat dibawa.

Terkait aspirasi yang terpendam dari penuturan narasumber utama selama menghuni di Rusunawa Pulogebang (RPG), berikut disajikan berdasarkan wawancara yang berlangsung pada 10 Maret 2017 di Lt 2, RPG:

”Tadi saya juga gak ada loh pengen jadi RT. Pengen warga saya jangan ditindas gitu masa saya. Iya kalo PKK ada. Ya PKK, PKK aja. Lah orang sini banyaknya, PKK kan terbatas. Saya tuh maunya ngajuin ke Pak Ahok langsung gitu, Bu. Warga saya ini supaya gak ada yang sakit hati. Pas pilkada aja, blok sini Ahok semua. Gak boleh sakit hati. Nanti kalo ada rejeki ya.. gak ada yang jelekin. Pas saya pindah aja, mau makan apa. Tempo hari tu gini loh Bu. Saya sudah ke pak camat. Nanti mau dipinjamin modal 10 juta/KK, tapi nyatanya enggak. Diserahin ke RT, tanggungjawabin. Waktu itu, bank

²Menurut pengakuan narasumber, sebenarnya posisi rumah beliau dan beberapa warga lainnya masih berada di zona aman dimana warga yang sudah tinggal di sana selama bertahun-tahun bisa mengajukan permohonan untuk memiliki izin berupa Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP).

sampah juga begitu. Kalo ada yang lewat, jual. Kalo cuma ditumpuk doang? Kalo koperasi itu, kasian orang-orang yang jualan itu. Ada orang ngutang dari luar, bunganya gede, jadi tergecet itu kasian. Koperasi gak minjem-minjemin duit, Bu. Dulu tiap bulan saya dapat beras sayur ke kota. Sekarang stop dulu habis pilkada. Blok saya ini kan pada sepi. Disini gak ada orang, pada jualan ke sono ke jembatan”.

Dari hasil observasi dan wawancara langsung, peneliti turut merasakan masih banyaknya keluhan dan kebutuhan narasumber kunci setelah 1,5 tahun menetap di RPG. Bidang kehidupan yang paling menonjol adalah lapangan ekonomi untuk ‘menyambung hidup’ dengan hilangnya mata pencaharian lama di tempat lama yang tidak bisa diupayakan lagi di tempat yang baru. Selain itu, fasilitas kesehatan juga belum lengkap. Yang tersedia hanya klinik kecil dengan obat-obatan *generik* yang ditangani perawat, bukan dokter. *Key informant* memiliki pengalaman terkait masalah kesehatan seperti yang dituturkan berikut:

“.. kalo orang tua, mana sampe sini naik turun tangga lagi, kempis-kempis lagi. Kalo naik, nafas sudah sesak, gitu-in dulu lah. Selama disini, naik terus, darahnya. Darah pernah 210/100, trus 180. Mungkin karna pikiran, tegang. Takut saya, bawa ke permai (klinik), duit lagi. Dikasih obat di bawah.”

Hal senada juga diungkapkan oleh narasumber (*informan*) lainnya. Dalam keseharian, Nati (sebagai informan 1) adalah perempuan paruh baya yang kental dengan aksen Jawanya. Sosok beliau yang periang dan ramah, membuat suasana pertemuan terasa akrab dan tidak berjarak. Dengan santai, Nati menceritakan suka-duka keluarganya selama setahun lebih menetap di RPG. Diawal menghuni RPG, selama 3 bulan tinggal gratis lumayan agak membantu. Kondisi ruang tamu yang sempit, 2 kamar tidur yang juga tidak besar, kamar mandi serta dapur yang kecil, dirasakan Nati tidak terlalu nyaman untuk ditinggalin bersama dengan anak-anaknya, termasuk anaknya yang sudah berkeluarga yang memiliki anak balita.

Tiap bulan, rata-rata biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp 400.000, dimana Rp 254.000 untuk sewa kamar, sisanya untuk biaya air dan listrik. Dengan difasilitasi pihak pengelola tidak membayar sewa selama 3 bulan pertama di awal pindah ke RPG, sebenarnya keinginan ibu Nati adalah bisa menempati kamar yang masih kosong. Karena di blok H dihuni oleh warga eks-Kalijodo, ibu Nati merasa keberatan jika kamar kosong diberikan (disewakan) ke orang lain, sementara beliau sendiri masih membutuhkan. Demikian halnya dengan kegiatan niaga untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Hampir semua warga eks-Kalijodo harus kehilangan mata pencaharian. Dahulu, warga (perempuan, khususnya) bekerja di sektor informal (misalnya: kerja serabutan, membantu pekerjaan rumah tangga-cuci gosok dan berdagang). Namun semenjak menghuni RSP, ‘ruang gerak’ semakin terbatas. Tidak semua warga rusun diperbolehkan membuka ‘lapak’nya masing-masing. Pihak pengelola rusun sebenarnya telah menyediakan beberapa kios di lapangan tengah. Di samping itu, banyak warga yang memiliki modal juga membuka dagangannya. Sehingga, warga eks-Kalijodo yang terakhir masuk ke wilayah RPG merasa memiliki peluang yang sedikit jika bersaing membuka dagangan seperti sembako, misalnya.

“Iya... udah sama-sama sakit, gitu..janganlah. Orang-orang yang punya duit, dikasih kantin di Kalijodo. Orang-orang gusuran Kalijodo, malah gak dapet. Kalo semua dah pada jualan, pembelinya gak ada. Modal saya juga gak punya. Saya KTP DKI Jakarta puluhan tahun, KK ada. Mau dapat kontrakan warung malah akhirnya dapat SPL.”

Opini yang tidak jauh berbeda juga dilontarkan informan ke-2 terkait bidang ekonomi. Perempuan *single parent* yang memiliki seorang putra yang duduk di sekolah dasar ini masih kesulitan mencari pekerjaan. Pekerjaan yang dilakoni di Kalijodo berkulat di setor informal seperti berniaga. Namun sayang, hampir 2 tahun berada di Kalijodo, Minah tidak memiliki modal untuk memulai usaha. Jika sebelumnya masih bisa meminjam dari teman—sesama warga di Kalijodo—maka sekarang hal tersebut tidak dapat dilakukan mengingat masing-masing warga juga berusaha ‘bangkit’ dari keterpurukan dan memulai kembali ‘lembaran baru’ kehidupan mereka.

Berikut opini yang diungkapkan narasumber:

“Gak ada kerjaan. Saya mah kalo ada kerjaan, saya jalanin. Kalo pengelola, cuma nanggung tempat tinggal, gak ada lowongan. Gak betah, bosan, saya mau nyapu, negepel. Disini kan kalo punya keahlian, keluar. Keluar juga kalo gak ada modal, susah.”

Dari penuturan tersebut, tidaklah mengherankan jika Minah bersama-sama warga lainnya turut menunggak pembayaran sewa kamar. Sebenarnya, pekerjaan serabutan pernah dilakoninya yakni mengasuh anak balita, namun hanya sementara (3 bulan). Sampai tulisan ini disajikan, narasumber belum juga mendapatkan pekerjaan tetap. Keluhan lain yang disampaikan narasumber adalah posisi kamar di lantai 5 yang ditempati. Lokasi paling atas memang menjadikan warga harus berfikir ulang jika mobilisasi (naik-turun tangga) terlalu sering.

Jika mengacu pada Teori Kelompok Bungkam, peneliti menemukan bahwasanya peran (sistem) bahasa yang ada dalam komunitas/masyarakat yang terbungkam adalah sama. Dimana kaum perempuan tidak bebas mengungkapkan keinginan mereka melalui ujaran atau pendapat. Pihak pengelola yang adalah mayoritas dari *gender* pria mendominasi ‘bahasa’ yang digunakan. Para warga eks-Kalijodo yang mayoritas adalah kaum perempuan (dan *single parent*) tidak bisa sebebasnya mengeluarkan pendapat pribadi jika bertentangan dengan aturan yang ada di rusun. Dalam konteks penelitian ini, kesamaan bahasa yang dituturkan oleh para perempuan tersebut adalah terkait ketidakberdayaan dalam bidang ekonomi. Kesempatan tidak terbuka secara merata untuk diberikan ‘prioritas’ mendapatkan lahan atau tempat usaha di lingkungan rusun. Hal yang sama juga dialami oleh narasumber ke-4 berikut.

Ijah (informan 3) merupakan warga eks-Kalijodo yang menghuni RPG di blok H lantai 2. Bersama ketua RT—Mariamah—di masa-masa awal, Ijah juga berusaha bertahan (*survive*) dengan melibatkan diri mengikuti kegiatan/program yang diadakan oleh pihak pengelola RPG. Namun sayang, program yang dimaksud belum terlaksana secara matang. Berikut penuturan narasumber:

“3 bulan ikut program membuat. 3 bulan, gini-gini aja. Belum ada menghasilkan duit, ‘angin-anginan’. Kalo di rusun lain, Marunda,..dapet 900 loh... 900 ribu 1 kain. Kayak kain gini nih...(sambil menunjukkan kain yang dipakainya). Ketahuan duitnya. Rusun Rawabebek juga. Kegiatan PKK juga gak ada. Blok ini (blok D) doang yang ada PKK.”

Berdasarkan ringkasan komentar narasumber tersebut, ada keterkaitan dengan asumsi *Muted Group Theory*. Pada dasarnya, munculnya kelompok bungkam adalah disebabkan tekanan dan tindasan terhadap suatu kelompok baik dalam bentuk ras, *gender*, pekerjaan atau dimana suatu kelompok tersebut sulit menyampaikan gagasan atau ide. Dalam lingkungan masyarakat rusun, yang menjadi kelompok dominan bukan hanya pihak penguasa (baca: pengelola), melainkan kaum pria. Kaum pria (sebagai kepala rumah tangga) diprioritaskan untuk memperoleh pekerjaan di sekitar rusun, seperti petugas kebersihan sementara pihak perempuan hanya dapat berdagang di sekitar rusun dan tentunya mengurus rumah tangga. Selain faktor *gender* dan pekerjaan, pembungkaman dapat terjadi sebagai hasil dari ketidakpopuleran pandangan yang berusaha untuk diungkapkan seseorang.

Dari keseluruhan hasil penelitian, peneliti mengkategorisasikan temuan penelitian sebagai berikut:

Tabel 1: Kategorisasi Opini

Narasumber	Opini tersembunyi		
	Ekonomi (Tidak terbuka kesempatan merata untuk berusaha, bekerja di kompleks rusun)	Sosial (Program/kegiatan kurang di- <i>maintain</i>)	Fasilitas rusun (kurang memadai)
Key informant	V	V	V
Informant 1	V	V	V
Informant 2	V	V	V
Informant 3	V	V	V
Informant 4	V	V	V

4. KESIMPULAN.

Peneliti menjawab rumusan masalah dari hasil penelitian yang didapatkan bahwasanya opini perempuan yang terdampak dari program penertiban pemukiman (relokasi) kawasan Kalijodo (Jakarta Barat) menguatkan Teori Kelompok Bungkam. Para perempuan belum terlalu 'berani' (frontal) menyikapi program atau kebijakan yang diterapkan yang belum sesuai dengan aspirasi warga perempuan. Disamping hal tersebut, kaum perempuan yang menjadi kelompok minoritas juga masih harus tunduk (menyesuaikan) dengan kebijakan yang ditetapkan pengelola (kelompok mayoritas).

Referensi

- Ardianto, Elvinaro. 2010. *Metodologi penelitian untuk public relations*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Arifin, Anwar. 2008. *Opini publik*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
File:///C:/Users/user/Downloads/Muted_Group_Theory.pdf
<File:///C:/Users/user/Downloads/3568-6750-1-SM.pdf>
- Denzin, Norman K & Yvonna S Lincoln. (2011). *Handbook of qualitative research*. USA: SAGE Publications, Inc.

Griffin, Em. (2012). *A first look at communication theory: Eight edition*. New York: McGraw Hill

<http://jurnalgender.uinsby.ac.id/index.php/jurnalgender/article/view/10>

<http://www.e-jurnal.com/2014/02/pengertian-opini-publik.html>

www.institutperempuan.or.id/?p=17

<http://m.harianindo.com/2016/02/15/82019/ahok-targetkan-akhir-bulan-ini-penggusuran-kalijodo-bisa-rampung/>

m.liputan6.com/news/read/2159895/ini-5-target-penertiban-pemprov-dki-di-tahun-2015

http://repository.upnyk.ac.id/756/1/Model_Komunikasi_dalam_Sosialisasi_Pengarusutamaan.pdf

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/02/25/o33gso330-penggusuran-kalijodo-mulai-dilakukan-akhir-pekan-ini>

Idrus, Nurul Ilmi. *Antropologi feminis: Etnografi, relasi gender dan relativisme budaya di Indonesia*. Jurnal Antropologi Indonesia Volume 30 No. 3, 2006. Universitas Hasanuddin.

Kriyantono, Rachmat. (2009). *Teknik praktis riset komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Lestari dan Dewi. 2010. *Model komunikasi dalam sosialisasi pengarusutamaan gender dan anggaran responsif gender di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8, (2): 191-203.

Littlejohn. Stephen W & Karen A Foss. (2011). *Teori komunikasi: Edisi 9*. Jakarta: Salemba Humanika

megapolitan.kompas.com/read/2016/03/03/19022641/

Morissan. (2013). *Teori komunikasi: Individu hingga massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Mulyana, Deddy dan Solatun. (2008). *Metode penelitian komunikasi: Contoh-contoh penelitian kualitatif dengan pendekatan praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Musta'in. 2013. *Sisi Lain Perempuan Dalam Sorotan Media; Tinjauan Teori Kelompok Bungkam (Muted Group Theory-Management)*. JSIGI, Vol. 4(No): 01,

Neumann, W. Lawrance. (2013). *Metodologi penelitian sosial: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif: Edisi 7*. Jakarta PT Indeks.

- Nimmo, Dan. (2000). *Komunikasi politik: Khalayak dan efek*. Bandung: PT Remaja
- Olii, Helena. (2007). *Opini publik*. Jakarta: PT Indeks
- Rohim, S. (2009). *Teori Komunikasi: Perspektif, ragam & aplikasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Soemirat, Sholeh & Elvinaro Ardianto. (2008). *Dasar-dasar public relations: Cetakan ke-6*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Sugiyono. (2011). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan HRD*. Alfabeta: Bandung,
- West, Richard & Lynn H Turner. (2010). *Teori komunikasi: Analisis dan aplikasi: Buku 2 edisi 3*. Jakarta: Salemba Humanika